

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Desa Geuceu  
Komplek Kecamatan Banda Raya)**



**Disusun Oleh:**

**RISKI ULFA NAZILLA  
NIM. 140602016**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Desa Geuceu  
komplek Kecamatan Banda Raya)**



**Disusun Oleh:**

**RISKI ULFA NAZILLA  
NIM. 140602016**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riski Ulfa Nazilla  
NIM : 1400602016  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

BandaAceh, 13 Juli 2018

Yang Menvatakan  
**METERAI  
TEMPEL**  
20  
5783BAFF467407005  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
Riski Ulfa Nazilla

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)**

Disusun Oleh:  
Riski Ulfa Nazilla  
NIM: 140602016

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19830709 201403 2 002

Pembimbing II,



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP. 19720428)200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**SKRIPSI**

Riski Ulfa Nazilla

NIM: 140602016

Dengan Judul:

**Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018  
13Dzulkaidah 1439H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

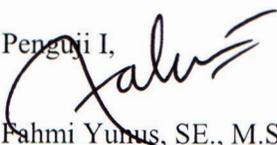
Sekretaris,

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak..CA  
NIP. 19830709 201403 2 002

  
Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Penguji I,

Penguji II,

  
Fahmi Yunus, SE., M.S  
NIP. 19760825 201403 1 001

  
Hafizh Maulana, SP., SHi., ME  
NIDN. 200619002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP.19640314 199203 1003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

**Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riski Ulfa Nazilla

NIM : 140602016

Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : Riskiulfanazilla1996@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KRU  Skripsi  .....

Yang berjudul :

**Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu memin taizin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Juli 2018

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Riski Ulfa N

Cut Dian Fitri, SE., M.Si  
NIP. 19830709 201403 2 002

Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)**". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA dan Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.P
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua dan Hafidhah, SE, M.Si serta Akmal Riza, SE, M.Siselaku staf Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Cut Dian Fitri, SE,. M.Si., Ak., CA sebagai Pembimbing I dan Ibu Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini.
5. Fahmi Yunus, SE., M.S danHafiizhMaulana, SP., SHi., ME. selaku dosen penguji I dan dosen penguji II.

6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi yang terbaik buat saya, dan seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya dan seluruh bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Ayahanda Zaidin Nyak Syam dan ibunda tercinta Atina yang telah memberikan doa dan kasih sayang. Terimakasih kepada abang tersayang yang telah memberikan pengorbanan baik berupa moral maupun materi kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan Hayatul Khusna, M.Reza Fahlevi, Awallul Ramadhana, T.M.Gufran, Jarjis yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga juga untuk Chairunnasyang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Banda Aceh, 13 Juli 2018  
Penulis,

Riski Ulfa Nazilla

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158  
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | t     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | '     |
| 4  | ث    | S                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Z                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | '     |
| 14 | ص    | S                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan ya  | ai             |
| ◌َ و            | <i>Fathah</i> dan wau | au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اَ / اِ          | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| اِ               | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| اُ               | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

|                |  |
|----------------|--|
| Nama           | : Riski Ulfa Nazilla   |
| Nim            | : 140602016  |
| Fakultas/Prodi | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah   |
| Judul Skripsi  | : Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya) |
| Tanggal Sidang | : 26 Juli 2018   |
| Tebal Skripsi  | : 87 Halaman   |
| Pembimbing I   | : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  |
| Pembimbing II  | : Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si  |

Penelitian ini bertujuan untuk proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek dan dampak alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat Desa Geuceu Komplek yang berjumlah 22 jiwa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama dan disajikan secara transparan dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat di desa Geuceu Komplek terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya prinsip swakelola baik fisik dan non fisik.

Kata Kunci : Efektifitas, Dana Desa, Pembangunan, Kesejahteraan

## DAFTAR ISI

|   | Halaman      |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>      | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>        | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>    | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>   | <b>iv</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>     | <b>v</b>     |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b> | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>               | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>        | <b>ix</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                       | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                   | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                  | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>              | <b>xix</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>  |
| 1.1 .Latar Belakang .....                        | 1         |
| 1.2 Rumusan masalah .....                        | 8         |
| 1.3 Tujuan penelitian .....                      | 8         |
| 1.4 Manfaat penelitian .....                     | 8         |
| 1.5 Sistematika penulisan.....                   | 9         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>             | <b>10</b> |
| 2.1 Konsep Efektivitas .....                     | 10        |
| 2.2 Dana Desa .....                              | 11        |
| 2.3 Perwal Tentang Alokasi Dana Desa.....        | 14        |
| 2.4 Perwal Tentang Pembangunan Desa.....         | 16        |
| 2.5 Kesejahteraan .....                          | 20        |
| 2.6 Ekonomi Islam .....                          | 22        |
| 2.7 Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.... | 25        |
| 2.8 Keuangan Publik Islam .....                  | 28        |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 2.9   | Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik Islam.....    | 29        |
| 2.10  | Keterkaitan Antara ADD Dengan Kesejahteraan.....            | 30        |
| 2.11  | Penelitian Terkait.....                                     | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>             |   | <b>37</b> |
| 3.1   | Jenis Penelitian .....                                      | 37        |
| 3.2   | Teknik Pengumpulan Data .....                               | 37        |
|   | 3.2.1 Metode Dokumentasi .....                              | 37        |
|   | 3.2.2 Metode Wawancara.....                                 | 37        |
|   | 3.2.3 Metode Observasi.....                                 | 38        |
| 3.3   | Sumber Data .....   | 38        |
| 3.4   | Informan Penelitian .....                                   | 38        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 40</b> |   | <b>40</b> |
| 4.1   | Sejarah Gampong Geuceu Komplek .....                        | 40        |
| 4.2   | Keadaan Geografis Desa Geuceu Komplek .....                 | 40        |
| 4.3   | Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geuceu Komplek .....  | 41        |
| 4.4   | Visi Dan Misi Desa Geuceu Komplek.....                      | 42        |
| 4.5   | Karakteristik Informan.....                                 | 43        |
|   | 4.5.1 Menurut Jenis Kelamin .....                           | 43        |
|   | 4.5.2 Informan Menurut Jenis Pekerjaan .....                | 44        |
|   | 4.5.3 Informan Menurut Kelompok Usia .....                  | 45        |
|   | 4.5.4 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....        | 46        |
| 4.6   | Pembahasan .....  | 48        |
|   | 4.6.1 Gambaran Jumlah ADD dan Pendapatan Asli Gampong ..... | 48        |
|   | 4.6.2 Proses Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa .....      | 50        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.6.3 Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat ..... | 51        |
| 4.6.4 Azas Transparansi Pengalokasian Dana Desa.....                                | 53        |
| 4.6.5 Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....                     | 54        |
| 4.6.6 Persepsi Warga Tentang Alokasi Dana Desa.....                                 | 55        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>58</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 58        |
| 5.2 Saran .....   | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>64</b> |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terkait .....                   | 35      |
| Tabel 3.1 Subjek Penelitian .....                            | 39      |
| Tabel 4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.. | 43      |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Geuceu Komplek.....     | 41      |
| Gambar 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....       | 44      |
| Gambar 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....     | 45      |
| Gambar 4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....                | 46      |
| Gambar 4.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... | 47      |
| Gambar 4.6 Jumlah Alokasi Dana Desa.....                               | 48      |
| Gambar 4.7 Pendapatan Asli Gampong.....                                | 49      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....       | 64      |
| Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian ..... | 65      |
| Biodata.....                            | 70      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (Rosnawati, 2015).

Pembangunan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salahsatu tahapan yang dilakukan yaitu dengan membangun desa-desa mandiri dan pembangunan yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan

kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawacita (sembilan agenda atau program) yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Dalam hal ini alokasi dana desa seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki harus sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah mufakat dengan memprioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Pada undang- undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dana daerahnya.

Salahsatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran

pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD)(Hanif, 2011).Efektivitas pengelolaan dana desa membutuhkan inovasi supaya dana desa yang digunakan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Karena dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran supaya realisasi anggaran sesuai rencana. Oleh karena itu,pemerintah daerah diharapkan melakukan pengawasan agar pengalokasian dana desa berjalan dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Ada 2 parameter yang digunakan untuk mengukur suatu kebijakan itu sudah sesuai dengan ekonomi syariah ketika: pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang tersebut seperti adanya unsur maisir. Dan kedua, menjaga adab (akhlak). Diantara adab-adab tersebut adalah bekerja secara profesional karena itu tuntunan dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “sesungguhnya Allah SWT menyukai bila kalian melakukan sesuatu pekerjaan dengan rapi.” (HR Baihaqi).

Unsur-unsur dalam ekonomi Islam dalam mengatur aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Aktivitas tersebut dilakukan dengan melakukan alokasi dan penggunaan sumber daya yang sesuai tujuan dengan berdasarkan pada asas keadilan atau keseimbangan, solidaritas sosial dan jalinan moral, kerjasama dan partisipasi. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan merupakan tujuan utama melainkan hanya sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengabdikan (ibadah) kepada Allah Swt. Semua aktivitas tersebut ditujukan untuk kebaikan seluruh umat manusia (*falah* dan *maslahah*).

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rorong, 2015).

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antar desa dan kota. Pemerintah menerapkan paradigma “membangun dari pinggiran” yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya

pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan (BAPPENAS, 2017).

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kedepan. Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik (Mauliddin, 2017). Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui surat Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

artinya “*Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinyabergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintahAllah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehinggamereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabilaAllah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yangdapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*”.

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desadi seluruh Indonesia. Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat.

Penelitian tentang dana desa telah banyak dilakukan. Gustaf (2016) meneliti tentang dana desa yang berjudul “*Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran*

2015”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Efektifitas penggunaan di desa Mantehage 1 Bango tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan yang ditinjau dari segi kualitas pembangunan. Mauliddin (2017) juga meneliti tentang dana desa yang berjudul “*Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*”. Dari hasil penelitiannya bahwa Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa Geuceu kompleks sendiri dapat dikategorikan sebagai desa dengan masyarakat kelas menengah yang dilihat dari jenis pekerjaannya yang mana Desa Geuceu Komplek sendiri memiliki jumlah masyarakat sebesar 1.794 jiwa, yang dominannya memiliki jenis pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta selebihnya berprofesi sebagai pedagang serta kuli bangunan. Dilihat dari jenis pekerjaan masyarakatnya yang dominan sebagai PNS dan Pegawai Swasta, peneliti ingin mengetahui apakah dana desa tersebut dapat efektif digunakan untuk untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek?
2. Bagaimana efektivitas alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu komplek?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek.
2. Untuk mengetahui efek alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat desa khususnya para perangkat desa dalam menjalankan serta pengambilan keputusan saat pelaksanaan program dana desa yang baik dan tepat sasaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan dapat menjadi sebagai suatu informasi mengenai kesejahteraan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kerangka penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini peninjaun kembali penelitian atau laporan-laporan mengenai masalah yang berkaitan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang dilakukan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini memuat tentang hasil dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

## **2.2 Dana Desa**

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, yang menjadi salah satu program Nawacita (sembilan program) dalam mewujudkan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia melalui program ADD. Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan (Maulidin, 2017).

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan ke-rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP No 72 Tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional kesetiap desa.

Peraturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detil dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa dalam permendagri No. 37 Tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara perhitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya (Baharim, 2017).

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes/APBG oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan hukum.
- c. Aloksi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dilakukan akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Untuk melaksanakan ADD secara efektif, maka pemerintah telah mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang penetapan prioritas dalam penggunaan dana desa (Thalia, 2017).

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
4. Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

### **2.3 Perwal Tentang Alokasi Dana Desa**

Ketentuan umum pengalokasian dana desa terdapat dalam perwal (Peraturan Walikota) tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Peraturan walikota tentang cara pengalokasian dan rincian alokasi dana gampong untuk setiap gampong tahun anggaran 2018

#### Bab 1

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Walikota adalah Wali Kota Banda Aceh
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi dana gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Pemerintah gampong adalah keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong
7. Anggaran pendapatan dan belanja gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana tahunan pemerintahan gampong.
8. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh

penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening kas umum gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.

#### **2.4 Perwal Tentang Pembangunan Desa**

Penggunaan dana desa berdasarkan perwal (Peraturan Walikota) tahun anggaran 2018

##### **Pasal 10**

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Produk unggulan Gampong atau Kawasan Perdesaan
- b. BUMG
- c. Embung, dan
- d. Sarana OlahRaga Gampong sesuai dengan kewenangan.

##### **Pasal 11**

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana

desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan gampong, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. Lingkungan pemukiman.
  2. Transportasi.
  3. Energi, dan
  4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. Kesehatan masyarakat, dan
  2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:
  1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan.
  2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan Gampong, dan

3. Usaha non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran pengembangan produk unggulan gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
  2. Penanganan bencana alam, dan
  3. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.

### Pasal 13

1. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat gampong dengan membedayagunakan potensi dan sumber daya sendiri sehingga gampong dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud diprioritaskan meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gampong.
- b. Pengembangan kapasitas di gampong meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat gampong.
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi gampong.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya.

- j. Pengembangan kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga, dan
  - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.
3. Pengembangan kapasitas di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwakelola oleh gampong atau badan kerja sama antar gampong.
  4. Swakelola oleh badan kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar gampong.

#### Pasal 15

1. Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
2. Pemerintah kota melakukan pendampingan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana desa.
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

### **2.5 Kesejahteraan**

Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini

diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Widyastuti, 2012).

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Hukom, 2016).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran untuk menilai keadaan suatu masyarakat untuk dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa penjelasan kesejahteraan masyarakat menurut organisasi-organisasi sosial.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

## 2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas transportasi.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: (a) Tingkat pendapatan, (b) Tingkat pendidikan, (c) Tingkat kesehatan dan (d) Fasilitas Pembangunan

## 2.6 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya

persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Sementara secara makro, misi ini mengarah kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridhai Allah SWT. Karenanya, ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi lain, yang menurut Abu Saud, ada tiga konsep dasar ekonomi Islam: pertama, ilmu ekonomi dititik beratkan padausaha mencapai tujuan; kedua, beriman kepada ke-Esaan Allah; dan ketiga, dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku (Athoillah, 2013).

Beberapa konsep tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam yaitu,

1. M.Umer Chapra, menurut ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.
2. M. Akram Kan, secara lepas mengartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif

(kebahagian hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisasikan sumber daya alam) (Nasution, 2006).

Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ukhrawi. Ekonomi Islam juga tidak sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Hakim, 2010).

Tujuan dari sistem Islam sangat berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Hal ini tidak memerlukan pembahasan secara keseluruhan dan hanya terkait sasaran- sasaran yang secara langsung relevan dengan kehidupan ekonomi. Islam berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat beraktifitas sesuai kebebasan sebagai manusia dengan syarat mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan setiap individu serta kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dengan peraturan yang adil. Ekonomi dalam sistem Islam memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, (2) pembangunan ekonomi (dengan maksud untuk mempertahankan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang berkembang

dan juga untuk memperoleh identitas yang kuat agar mampu mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya dan membantu identitas serupa dalam tugas manusia yang sama), dan (3) mencegah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

## **2.7 Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam**

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual.

Ekonomi Islam menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayahal-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Sodiq, 2015).

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pelengkapan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka (Purwana, 2015).

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada

kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *fallah*. Dalam pengertian sederhana, *fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*fallah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu untuk saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial.

*Fallah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu

dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah.

## **2.8 Keuangan Publik Islam**

Peran efektif negara sebagai mitra dan fasilitator tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi Islam termasuk pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik merupakan aktifitas manusia dalam hal ini penguasa yang mengatur sejumlah harta negara untuk kepentingan- kepentingan publik atau warga negara. Sehingga dengan demikian, suksesnya pengelolaan keuangan publik merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan negara untuk kesejahteraan warga negaranya.

Secara historis, ada dua hal yang menjadi landasan pengelolaan kebijakan publik pada masa-masa Islam, yaitu mengedepankan masalah syariat dan menerapkan gaya hidup sederhana dan merasa berkecukupan (*qana'ah*). Pada era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dana Baitul Mal benar-benar dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independen, kehati- hatian dan adil. Rasulullah dan para khalifah sama sekali tak tergiur untuk menggunakan dana yang bertumpuk di kas negara itu untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Pejabat korup dipecat dan dipenjara. Sehingga uang yang berasal dari rakyat benar- benar tersalur kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dimana kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama,

pendidikan, gaji pegawai, pertahanan militer, serta pembangunan infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang dipaparkan diatas, maka pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan, menciptakan surplus anggaran negara, meminimalkan angka kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja.

## **2.9 Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik Islam**

Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Prinsip utama yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana menerapkan *balanced budget*. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan (Amalia, 2007).

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah- kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai- nilai Islam dan maqashid harus dilakukan. Maqashid akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas (Chapra, 2000).

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat (P3EI, 2008).

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam harus mengikuti aturan- aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh (Al-Haritsi, 2006).

Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam memang memiliki kesamaan dengan pengertian yang dibuat oleh para ekonom modern, namun tidak berarti memiliki kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar- dasar aqidah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu ia mempunyai tujuan-tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain.

### **2.10 Keterkaitan Antara ADD dengan Kesejahteraan**

Dana desa merupakan alokasi bantuan sejumlah anggaran dari pemerintah pusat melalui desa. Dalam pemanfaatannya dana tersebut termasuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa

yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Apabila ADD dapat digunakan secara intensif dan efektif, maka ADD dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otoniminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu wilayah.

### **2.11 Penelitian Terkait**

Penelitian mengenai alokasi dana desa bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti, pengaruh, peranan, dan menganalisis mengenai efektivitas pengalokasian dana desa. Penelitian- penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Skripsi berjudul *“Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie”* oleh Arif Mauliddin 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah. Dan Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan diawal.

Skripsi berjudul *“Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam(studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”* oleh Anita Wulandari 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2016 di kecamatan padang cermin dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proposrsi untukmasing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif.

Skripsi berjudul *“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”* oleh arlianti Rorong,

Johny Lumolos, Gustaf.J.E.Undap 2016 skripsi ini menyimpulkan:

- a. Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Bango belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.
- b. Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Mantehage 1 Bangotidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan.

Skripsi berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*” oleh Wayan Saputra 2016, menyimpulkan Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. 1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2009 (98,89%), 2010 (100%), tahun 2011(100%), tahun 2012(89,24%),

tahun 2013(100%), dan tahun 2014 (99,57%).<sup>2)</sup> Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli yaitu: a) pemahaman masyarakat terhadap ADD, b) terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders, dan c) pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.

3) Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu a) mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masyarakat dan aparatur pemerintah desa, b) meningkatkan koordinasi antar unit kerja, c) membuat anggaran untuk dana cadangan program.

Skripsi berjudul “*Studi implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Tuna*” oleh Samsul Haharim 2017, menyimpulkan :

- a. Persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna secara umum yaitu sudah baik.
- b. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ADD dan DD dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten muna

yaitu masih kurang. Hal ini terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi yang disampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian Terkait**

| No | Peneliti                 | Judul Penelitian  | Hasil  |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | Arif Mauliddin,<br>2017  | Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.   | Efektifitas sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| 2  | Anita Wulandari,<br>2017 | Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam(studi dikecamatan padang cermin kabupaten pesawaran). | Pelaksanaan program ADD tahun 2016 tidak optimal secara keseluruhan. |

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

| No | Peneliti                  | Judul Penelitian  | Hasil  |
|----|---------------------------|---|--|
| 3  | Gustaf.J.E.Undap,<br>2016 | Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. | Penggunaan dana desa tidaklah efektif.       |
| 4  | Wayan Saputra,<br>2016    | Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa lembean Kecamatan Kintani, Kabupaten Bangli tahun 2009-2014.              | Pengelolaan ADD efektif.                     |
| 5  | Samsul Harim, 2017        | Studi implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Tuna.                | Implementasi kebijakan ADD tidaklah optimal. |

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menyimpulkan data yaitu sebagai berikut :

##### **3.2.1 Metode Dokumentasi**

Sugiyono, (2009) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

##### **3.2.2 Metode Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi-struktur. Menurut Sugiono (2015) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### **3.2.3 Metode Observasi**

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis mempergunakan metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum mengenai pengalokasian dana desa di Desa Geuceu Komplek.

## **3.3 Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara para aparatur desa dan beberapa masyarakat di desa Geuceu Komplek. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi desa Geuceu Komplek yang mengenai ADD dan dari profil Gampong Desa Geuceu Komplek.

## **3.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang diteliti. Subjek penelitian adalah sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Widodo, 2011). Key Informan adalah orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang

sedang diteliti tersebut. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

| No    | Informan                  | Jumlah | Keterangan   |
|-------|---------------------------|--------|--------------|
| 1     | Keuchik                   | 1      | Key Informan |
| 2     | Tuha Peut Gampong         | 1      | -            |
| 3     | Tuha Lapan                | 1      | -            |
| 4     | Sekretaris                | 1      | Key Informan |
| 5     | Kaur Umum Dan Perencanaan | 1      | -            |
| 6     | Kaur Keuangan             | 1      | -            |
| 7     | Bendahara                 | 1      | Key Informan |
| 8     | Kasie Pemerintah          | 1      | -            |
| 9     | Kasie Kesejahteraan       | 1      | -            |
| 10    | Kasie Pelayanan           | 1      | -            |
| 11    | Kapala Dusun              | 4      | -            |
| 12    | Anggota Masyarakat        | 8      | -            |
| Total |                           | 22     |              |

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Gampong Geuceu Komplek**

Nama Gampong Geuceu Komplek mulai tercetus pada tahun 1972, awalnya masih bergabung dengan Desa Lamlagang dan pada saat itu. Ada beberapa tokoh Gampong Geuceu Komplek salah satunya M. Saleh Paulus mereka sering berbeda pendapat/pandangan dengan tokoh Desa Lamlagang maka terjadilah pemisahan antara dua desa tersebut. Gampong Geuceu Komplek terdiri dari atas dua suku kata yaitu Geuceu dan Komplek menurut keterangan dari narasumber dan pelaku sejarah yang memang asli penduduk gampong Geuceu Komplek Marliansyah bahwa kata “*Geuceu*” yang bermakna *garis/batas*, dan kata “*Komplek*” bermakna *komplek perumahan*. Pada saat itu salah satu dusun (dusun IV) ada pembangunan perumahan kompleks kantor gubernur. Pada saat ada kegiatan besar seperti Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tahun 1972 tamu dari daerah sering memakai fasilitas perumahan/komplek tersebut sehingga populer, maka disepakatilah nama Gampong Geuceu Komplek pemukiman Banda Jaya dan sekarang berada dalam Kecamatan Banda Raya.

#### **4.2 Keadaan Geografis Desa Geuceu Komplek**

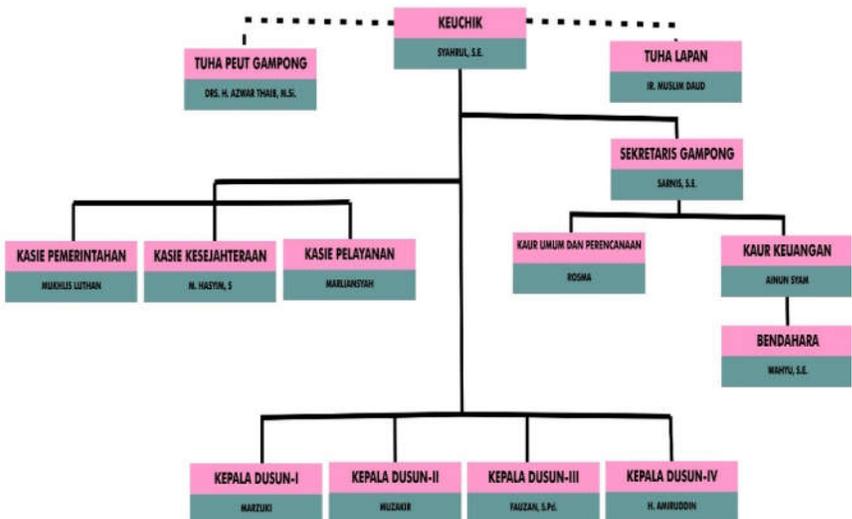
Desa Geuceu Komplek adalah salah satu desa diantara 10 desa yang ada di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan luas

47,5 Ha yang terdiri dari 1.794 jiwa dari empat dusun. Luas wilayah Gampong Geuceu Komplek 47,5 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamlagang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamlagang/Lhong Cut
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lam Ara/Lhong Cut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kr. Daroy/ Gampong Geuceu Kayee Jato

#### 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geuceu Komplek

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geuceu Komplek adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geuceu Komplek**

#### **4.4 Visi Dan Misi Desa Geuceu Komplek**

Ada beberapa program 6 (enam) tahun yang akan datang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Gampong Geuceu Komplek tahun 2015-2020. Gampong Geuceu Komplek telah merumuskan visi dan misi untuk jangka 5 (enam) tahun. Adapun visi Desa Geuceu Komplek adalah “Mewujudkan kesejahteraan warga gampong Geuceu Komplek secara aman dan nyaman, melestarikan adat istiadat dan agama serta peningkatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah gampong”.

Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi Pembangunan Gampong Geuceu Komplek yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, aman dan transparan serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan taqwa.
3. Menggalakan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
4. Menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang keagamaan dan olah raga.
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman tertib dan teratur.

## 4.5 Karakteristik Informan

Pada sub bab ini akan dibahas karakteristik informan yang meliputi:

### 4.5.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini informan yang di ambil yaitu aparatur desa dan warga Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun informan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1  | Laki-Laki     | 14     |
| 2  | Perempuan     | 8      |

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa informan laki- laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Karena aparatur desa tersebut banyak laki- laki. Gambaran informan berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada diagram 4.1 sebagai berikut :

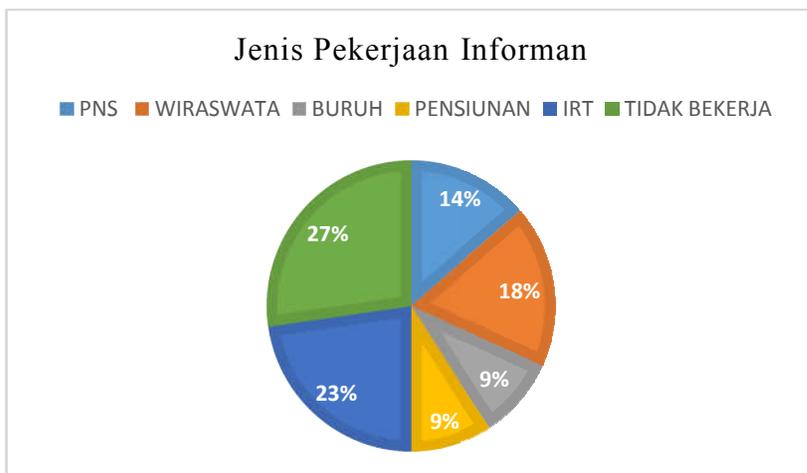


**Gambar 4.2 Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin**

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin informan pada diagram diatas, terlihat bahwa informan yang mendominasi dari jenis kelamin laki- laki. Informan jenis kelamin laki- laki sebanyak 64% (14 orang) dari 22 informan, sedangkan informan jenis kelamin perempuan sebanyak 36% (8 orang) dari 22 informan.

#### **4.5.2 Informan Menurut Jenis Pekerjaan**

Informan menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

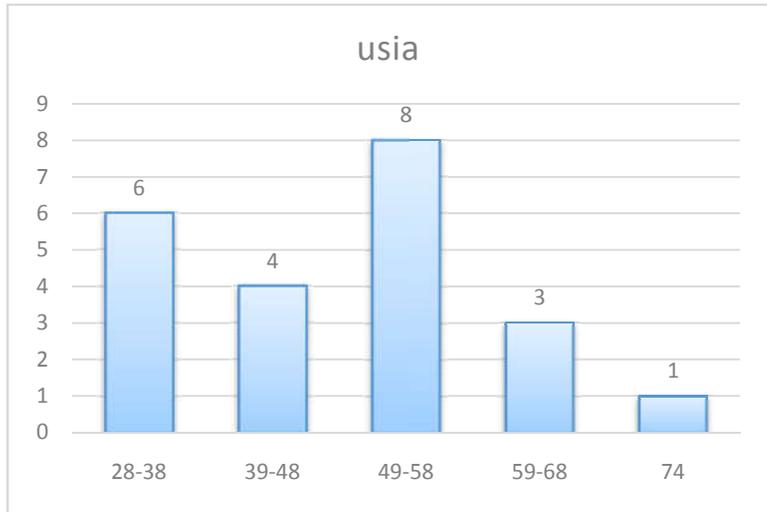


**Gambar4.3 karakteristik informan berdasarkan jenis pekerjaan**

Berdasarkan jenis pekerjaan informan berdasarkan gambar 4.3 bahwa informan yang tidak bekerja memiliki persentase tertinggi yaitu 27% atau 7 orang dari total 22 informan, sedangkan jenis pekerjaan informan yang terendah adalah pegawai negeri sipil dan wairaswasta yaitu 9% atau 4 orang dari 22 informan.

#### **4.5.3 Informan Menurut Kelompok Usia**

Usia menjadi suatu hal penting dalam memberikan informasi dalam suatu wawancara, karena apabila usia sudah tidak produktif maka informasi yang akan dihasilkan akan makin sedikit. Sehingga salah satu tolak ukur dalam memberikan informasi yaitu usia informan. Adapun gambaran umum informan sebagai berikut.



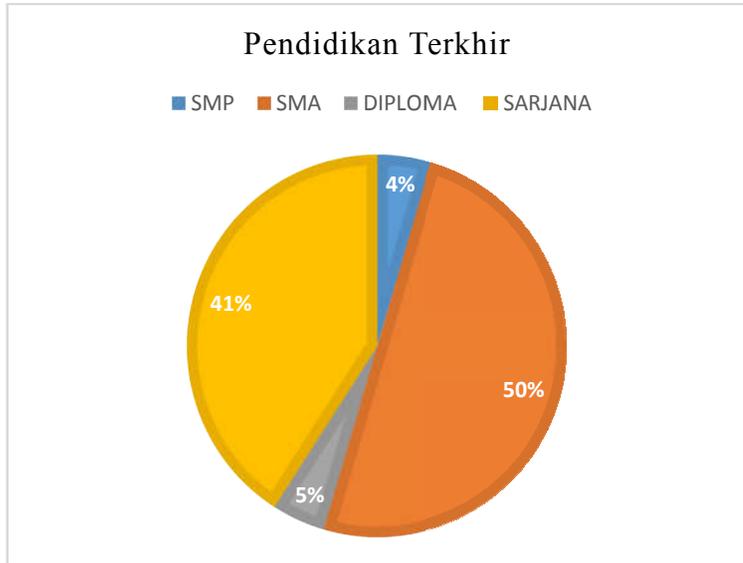
**Gambar 4.4 Karakteristik informan berdasarkan usia**

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui usia informan banyak terdapat diantara usia 49-58 tahun yaitu sebanyak 8 orang, informan yang paling sedikit terdapat pada usia 74 tahun hanya berjumlah 1 orang. Untuk informan yang berusia 28-38 tahun berjumlah 6 orang, informan pada usia 38-48 berjumlah 4 orang dan informan pada usia 59-68 berjumlah 3 orang

#### **4.5.4 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Kriteria pendidikan menjadi hal yang penting bagi informan agar dalam menjalankan pemerintahan desa terlaksana dengan baik karena apabila pendidikan informan tersebut semakin tinggi maka akan sangat berdampak dalam

menjalankan pemerintahannya. Karakteristik pendidikan terakhir informan sebagai berikut ini:



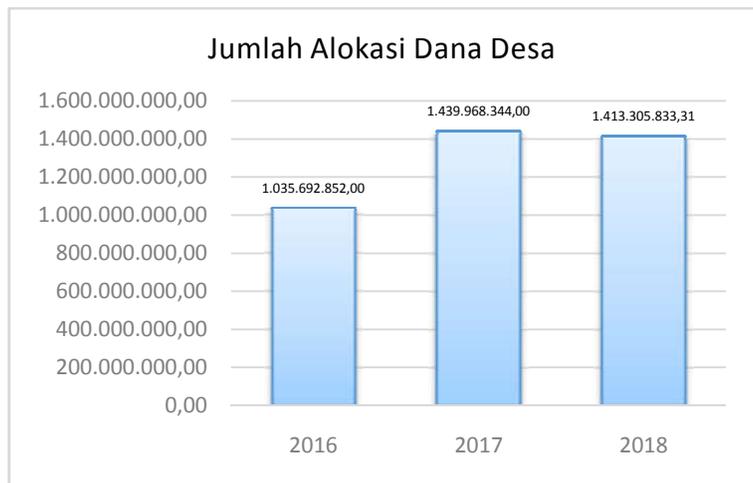
**Gambar 4.5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Dari gambar 4.5 informan dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah tamatan SMA dengan jumlah 50% (11 orang) dari 22 informan, informan tamatan SMP berjumlah 4% (1 orang) dari 22 informan, informan dengan pendidikan Diploma berjumlah 5% (1 orang) dari 22 informan, sedangkan untuk informan lulusan sarjana yaitu 41% (9 orang) dari 22 informan.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Gambaran Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Gampong

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Dana tersebut berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, kemudian disalurkan untuk desa guna untuk pembangunan desa. Berikut adalah grafik jumlah alokasi dana desa di desa Geuceu Komplek dari tahun 2016 -2018 dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini:



**Gambar 4.6. jumlah alokasi dana desa**

Berdasarkan gambar 4.6 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah alokasi dana desa di desa Geuceu Komplek mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Meskipun mengalami

sedikit penurunan diharapkan dengan adanya alokasi dana desa tersebut, pembangunan desa dapat meningkat dan dapat menyejahterakan warga di Desa Geuceu Komplek agar menjadikan desa Geuceu Komplek menjadi desa yang mandiri kedepannya.

Pendapatan Asli Gampong (PAG) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli gampong dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini:



**Gambar 4.7. Pendapatan Asli Gampong**

Berdasarkan gambar 4.7 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pendapatan asli gampong di desa Geuceu

Komplek selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin produktifnya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) seperti pendapatan dari sewa toko, jasa, dan sewa rumah. Bertambahnya pendapatan asli gampong ini dan dipergunakan untuk kepentingan sosial desa dan diharapkan mampu menyejahterakan warga di Desa Geuceu Komplek.

#### **4.6.2 Proses Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa**

Dalam menggerakkan roda pembangunan di desa khususnya mengenai perencanaan pembangunan di desa hendaknya disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Untuk menjalankan pembangunan desa tersebut maka perlu adanya penerimaan dana desa. Syahrul (Keuchik Desa Geuceu Komplek) mengatakan proses penerimaan dana desa diberikan dan diterima secara bertahap oleh desa setiap tahunnya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Geuceu Komplek. Wahyu (Bendahara Desa) juga mengatakan dana desa berasal dari APBN kemudian tranfer ke daerah kemudian pemerintah daerah menyalurkan ke masing-masing kab/kota dalam daerahnya, terakhir pemerintah kab/kota menyalurkan dana desa dalam wilayah kab/kota yang bersangkutan, jadi proses penerimaan dana desa ini berjalan lancar dan khusus untuk kota madya khususnya Kota Banda Aceh memiliki aturan sudah sangat bagus yaitu Peraturan Walikota yang memuat kemana dana desa tersebut harus

dialokasikan dan pemerintahan desa hanya perlu mengikut aturan tersebut.

Sarnis (Sekretaris Desa) menambahkan bahwa penggunaan dana desa yang diterima sudah diatur melalui Peraturan Walikota, pada tingkat nasional dinamakan dengan UU desa, untuk tingkat Provinsi khususnya di Aceh dinamakan dengan *qanun*. Tingkat daerah khususnya Kota Banda Aceh dinamakan dengan Peraturan Walikota. Jadi dalam penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Perwal dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat didalam Perwal tersebut. Hal ini disebabkan karena akan adanya pemeriksaan dari inspektorat terkait penggunaan dana desa yang diterima tersebut. Sehingga dengan diterimanya dana tersebut desa membuat program yang tidak bertentangan dari Perwal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan dianggarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga akan muncul skema (alur) dari penggunaan dana desa, yaitu adanya sumber dana kemudian dianggarkan, disahkan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.

#### **4.6.3 Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat**

Alokasi dana desa tersebut sangat berefek terhadap masyarakat terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya prinsip swakelola baik fisik dan nonfisik untuk warga di desa tidak boleh

dari pihak ketiga, kecuali tidak terdapat di desa maka baru boleh pihak ketiga. Swakelola ini mengandung asas keadilan dengan swakelola ini dapat meningkatkan ekonomi warga dari segi pendapatan yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada warga desa terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Untuk BUMG diharapkan bisa hidup dan berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan gampong seperti simpan pinjam atau dari sektor jasa seperti loket pembayaran rekening listrik dan lain-lain.

Efek dari adanya dana desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa lebih maju dengan pembangunan dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri. Wahyu (Bendahara Desa) mengatakan secara umum manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dari segi perkembangan masyarakat melatih ibu-ibu PKK. Kemudian untuk unit usaha desa ini sangat berpengaruh dalam hal menambah pendapatan asli gampong sehingga dapat dipergunakan untuk hal yang lain seperti sosial masyarakat. Lebih lanjut Sarnis (Sekretaris Desa) mengatakan dampak dari anggaran itu dapat dirasakan di semua elemen seperti pendidikan, kesehatan salah satu contohnya posyandu untuk balita dimana semuanya itu diambil dari dana desa, melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti fardhu kifayah mayit semuanya menggunakan dana desa guna untuk pemberdayaan masyarakat.

#### **4.6.4 Azas Tranparansi Pengalokasian Dana Desa**

Azas tranparansi pengalokasian dana desa untuk melihat apakah dana yang sudah diterima oleh desa dipaparkan atau dibahas untuk umum sehingga dalam proses pengalokasiannya memiliki prinsip keterbukaan. Syahrul (Keuchik Desa) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap dana desa baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi pengambilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat terhadap dana desa selalu mengedepankan musyawarah dan mufakad baik sesama masyarakat sendiri dan kepada para anggota Tuha Peut Gampong(TPG). Lebih jelasnya Sarnis (Sekretaris Desa) tidak ada yang bermasalah dalam pembangunan hal ini disebabkan, dalam penggunaan dana yang diberikan sudah di atur dalam perwal. Pembangunan dan penggunaannya juga sudah disahkan yaitu melalui rapat musyawarah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama aparatur desa, warga desa, TPG yang artinya semua elemen masyarakat termasuk didalamnya. Dengan azas tranparansi ini sehingga disahkan semanya hal yang terkait dengan alokasi dana desa didalam rapat musyawarah tersebut yang dilengkapi dengan dokumen beserta absensi dan dipaparkan dengan sangat jelas. Sehingga partisipasi warga sangat baik dalam hal ini dilihat pada saat dilaksanakan rapat umum tahun anggaran maka semua elemen masyarakat hadir, karena dilakukan secara tranparansi dan pada rapat umum ini semuanya dijelaskan, disetujui dan disahkan sehingga tidak terdapat kendala kedepannya.

Didalamnya unsur transparansi dan berkeadilan serta penggunaannya diatur dalam perwal dan harus sejalan dengan perwal tersebut dan bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan hal tersebut.

#### **4.6.5 Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Islam memiliki konsep kesejahteraan seluruh konsepnya pun telah diterapkan dengan baik, mulai dari zaman Rasulullah Saw sampai para Khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material seperti kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu, pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya sistem ekonomi semata melainkan juga sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.

Alokasi dana desa berefek positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa geuceu komplek. Hasyim (Kaur Keuangan) mengatakan dana desa ini sangat berpengaruh dalam hal mensejahterakan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan

infrastruktur desa dimana dampaknya dirasakan masyarakat. Kemudian dengan adanya prinsip swakelola pembangunan infrastruktur desa dimana warga dapat bekerja dan dapat meningkatkan pendapatan warga. Dari sektor unit produktif desa atau BUMG desa selain mampu mempekerjakan warga desa juga mampu meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli desa ini dapat disalurkan dalam sektor sosial lainnya seperti meningkatkan pendidikan anak dengan mengadakan perlombaan dan memberikan pelatihan terhadap ibu-ibu PKK terutama dalam hal meningkatkan kreatifitas warga.

#### **4.6.6 Persepsi Warga Tentang Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Geuceu Komplek**

Persepsi warga mengenai alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa tidak semuanya sama ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. 1(satu) di antara 8 (delapan) warga yang menjadi informan, mengakui kurang setuju, dengan salah satu pembangunan yang dilakukan. Beliau mengatakan *“Sebenarnya pembangunan yang dilakukan pada desa Geuceu Komplek ini sudah sangat baik, namun saya menyayangkan salah satu pembangunannya yaitu PAUD, kenapa saya menyayangkan PAUD tersebut padahal itu bermanfaat bagi masyarakat Geuceu? Karena yang saya ketahui di desa Geuceu Komplek ini ada perpustakaan yang terbengkalai, kenapa tidak perpustakaan itu saja yang di olah menjadi PAUD? Dari pada membangun pembangunan baru kan sayang, lebih bagus dana itu digunakan untuk yang lainnya”*.

Namun, beliau tidak dapat hadir pada saat musyawarah mengenai penggunaan dana desa, sehingga beliau tidak dapat menyampaikan kritik dan sarannya.

Atina (warga Desa Geuceu Komplek) mengatakan *“Saya sangat senang dengan pembangunan yang telah dilakukan meskipun tidak semua pembangunan dapat saya rasakan tapi mungkin itu sangat bermanfaat bagi masyarakat lainnya, untuk pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari pelatihan tersebut masyarakat bisa belajar lebih kreatif seperti yang tidak bisa kerajinan tangan dengan adanya pelatihan tersebut sudah memiliki skill untuk membuat kerajinan tangan sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan ilmu dan pelatihan yang diberikan”*.

Kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh warga yang berprofesi buruh harian lepas yaitu dengan adanya pembangunan desa warga yang berprofesi sebagai buruh ini dapat memiliki pekerjaan karena prinsip swakelola yang diterapkan. Ilham (warga Desa Geuceu Komplek) mengatakan bahwa *“Saya merasakan dampak dari alokasi dana desa dan pembangunan desa tersebut, terlebih lagi bagi yang berprofesi seperti saya sebagai buruh bangunan merasa senang karena setiap adanya pembangunan yang dilakukan di desa, khusus yang berprofesi sebagai buruh bangunan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan tersebut sehingga ini membantu yang berprofesi sebagai buruh lepas, jadi setidaknya dengan adanya*

*dana desa yang digunakan untuk pembangunan secara pendapatan terbantu dan adanya pekerjaan bagi yang berprofesi dalam bidang tersebut”.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan mengenai efektifitas pengalokasian dana desa dalam kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di Desa Geuceu Komplek, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Geuceu Komplek, dalam proses pelaksanaan program alokasi dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan di Geuceu Komplek dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan para aparatur desa yang membahas mengenai penggunaan dana desa baik dari segi pembangunan maupun dari segi kegiatan pelatihan, saat musyawarah tersebut masyarakat dapat memberikan kritik dan sarannya atau tanggapannya mengenai perencanaan pengalokasian dana desa yang telah dibuat oleh aparatur desa, tetapi dapat ikut memberi komentar dan masukan mengenai penggunaan dana desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan efektif, meskipun ada yang kurang setuju dengan pembangunan yang dilakukan namun 7 (tujuh) dari 8 (delapan) warga

yang menjadi informan mengatakan sangat terbantu dengan pembangunan dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. karena setiap pelaksanaan khususnya dari segi pembangunan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa sendiri yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Pada tahap pertanggungjawaban dalam proses pengalokasian dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek dapat dikatakan efektif karena setiap pengalokasian dana desa tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat pada saat dilakukannya musyawarah mengenai perencanaan pengalokasian dana desa.

2. Efek dari pengalokasian dana desa dalam mensejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek dikatakan efektif, karena pembangunan yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya ibu-ibu yang berprofesi sebagai IRT, yang dilihat dari minat dalam partisipasi kegiatan pelatihan yang dilakukan.

## **5.2 Saran**

Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peranan penting untuk menyikapi kondisi fisik maupun nonfisik dilingkungan Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Dari penelitian yang telah penulis lakukan peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat

membangun serta dapat dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah desa terkait dalam efektivitas pengalokasian dana desa (ADD). Adapun saran yang dapat diberikan kepada penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibidang infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan pembangunan dilakukan terarah dan tepat guna.
2. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa. Menyadarkan masyarakat arti pentingnya program-program pelaksanaan ADD demi mensejahterahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, J. b. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar bin Khatthab*. Jakarta: Khalifa.
- Amalia, E. (2007). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press.
- An Introduction To The Sharia Economic*, 2010, Jakarta: Zikrul Hakim
- Athoillah, M. A. (2013). *Ekonomi Islam: Transaksi Dan Problematikanya*. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* , 1-21.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Baharim, S. (2017). *studi implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa didesa bungi kecamatan kontunaga kabupaten muna*. kendari.
- Bappenas 2017 *Dana Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan* Indonesia kementrian Ppn/Bappenas
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hukom, A. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah*. Kalimantan Tengah.
- Mauliddin, A. (2017). *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjanong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry .
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwana, a. e. (2015). *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ponorogo.
- Rosnawati. (2015). *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negri Besar*. Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan.
- Sodiq, a. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. *jurnal ekonomi syariah*, 26.
- Thalia. (2017, September Selasa). *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. BUMDes* , p. 1.

- Widodo, T. (2011, April 1). *Istilah-istilah dalam penelitian ilmiah*. Retrieved April 1, 2011, from Kompasiana: <http://www.kompasiana.com>
- Widyastuti, A. (2012). Analisa Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economic Development Analysis Journal* , 1-11.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

**Pedoman wawancara penelitianEfekifitas Pengalokasian Dan  
Desa  
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif  
Ekonomi Islam**

**(studi desa geuceu komplek kecamatan banda raya)**

#### **I. Data pribadi informan**

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Jabatan :  
Jenis kelamin :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

#### **II. Wawancara informan**

1. Bagaimana proses penerimaan dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Geuceu Koplek ?

Jawab :

2. Bagaimana dampak dari penerimana dan penggunaan dana desa terhadap sosial (masyarakat) di Desa Geuceu Koplek ?

Jawab:

3. Bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan desa dari tahun ke tahun?

Jawab:

4. Apakah terdapat keterlibatan masyarakat terhadap dana desa baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi mengambil kebijakan terhadap dana desa tersebut?

Jawab:

5. Apakah tujuan dari adanya dana desa ini untuk mensejahterakan masyarakat ?

Jawab:

6. Apa harapan anda dari adanya dana desa ini ?

Jawab:

## **Lampiran 2 Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat**

### **Pedoman wawancara penelitianEfekifitas Pengalokasian Dan Desa**

#### **Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**(studi desa geuce komplek kecamatan banda raya)**

**Data pribadi informan**

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Jabatan :  
Jenis kelamin :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

1. Apakah pembangunan desa yang telah dilaksanakan bermanfaat dan sesuai kebutuhan bagi anda selaku masyarakat desa geuceu komplek?

Jawab:

2. Apakah anda sebagai masyarakat Desa Geuce Komplek merasa sejahtera dengan adanya dana desa tersebut?

Jawab:

3. Apa harapan anda selaku masyarakat desa mengenai dana desa tersebut?

Jawab:

### Lampiran 3 Dokumentasi penelitian







## **BIODATA**

Nama : Riski Ulfa Nazilla  
 Tempat/Tgl. Lahir : B. Aceh, 09 Juni 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Alamat Rumah : Geuceu komplek, Banda Raya, B. Aceh  
 Telp/Hp : 085373763500  
 Email : Riskiulfanazilla996@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

2002-2008 : SDN 50 Banda Aceh  
 2008-2011 : SMP Islam Darul Ulum  
 2011-2014 : MAN Model Banda Aceh  
 2014-2018 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Zaidin Nyak Syam  
 Nama Ibu : Atina  
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan  
 Pekerjaan Ibu : IRT

Banda Aceh, 13 Juli 2018

Riski Ulfa Nazilla